

HUMAS

Musda VI KNPI Buol Batal, Dan Akan Gelar Rapimda Kembali, Ada Apa???

Rahmat Salakea - BUOL.HUMAS.CO.ID

Nov 18, 2022 - 19:07



BUOL Akhirnya (Musda VI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buol Sulawesi Tengah (Sulteng) Batal Di gelar pada tanggal 19 November 2022.

Alasan penundaan tersebut diambil setelah dilakukan pleno DPD I KNPI Provinsi untuk melaksanakan kembali Rapimda untuk menyempurnakan keputusan yang sudah diambil dalam rapimda sebelumnya dan akan melibatkan Majelis Pemuda Indonesia (MPI)

Hal tersebut dinyatakan oleh Budi Su'a selaku ketua DPD II KNPI Kabupaten Buol dalam Video yang Berdurasi 2 menit 49 detik

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatu, saya selaku ketua DPD II KNPI Kabupaten Buol menyampaikan setelah dilakukan rapat pleno oleh DRD I KNPI Provinsi, kami akan melaksanakan Rapimda kembali untuk menyempurnakan keputusan yang sudah diputuskan pada rapimda sebelumnya," Kata Budi Sua Lebih lanjut kata Budi, Dalam pelaksanaan rapimda kedepan akan mengundang

kembali seluruh PK dan seluruh Pimpinan OKP di Kabupaten Buol

" Dan yang paling penting adalah penetapan tanggal pelaksanaan musda nanti, dan akan mengundang seluruh PK dan Pimpinan OKP di Kabupaten Buol" terangnya

Video yang berdurasi 2 menit 49 detik itu beredar di group media sosial Facebook dan mendapat tanggapan serius dari pemberhati KNPI Iskandar Nouk, menurutnya sikap yang diambil oleh DPD I provinsi bukanlah sebuah solusi justru akan menambah masalah.

" Malahan keputusan pleno DPD I KNPI lebih melanggar AD ART... dasar apa memerintahkan pengurus DPD II untuk melaksanakan RAPIMDA yang SK kepengurusannya sudah lama berakhir.... mohon DPD I KNPI jangan memperkeruh masalah...so tau sy tindakan organisasi tdk seperti itu...KNPI bukan organisasi biasa dan bukan organisasi keluarga yang semuanya saja untuk mengatur...tulisnya

menurut Iskandar Nouk mestinya DPD I KNPI Provinsi menunjuk karateker sesuai permintaan para OKP bukan justru menunjuk pengurus yang sudah tidak aktif lagi,

lebih lanjut kata iskandar " kalo betul seperti itu petunjuk DPD I perlu dipertanyakan kemampuan pengurusnya... karena petunjuk tersebut bukan solusi tapi hanya menambah masalah dan membuat kegaduhan terhadap okp2 di bawah naungan knpi buol " Tutupnya***